



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HIMMAWAN UTOMO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 734171

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **745.000.000**

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/9 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **111.750.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.250.000
2. MOTOR, YAMAHA XSR155 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOBIL, HONDA SEDAN CITY Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **5.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **60.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

921.750.000

III. HUTANG

Rp.

75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

846.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.